

NARASI ILMIAH FENOMENA ABDI-DALEM KRATON KASUNANAN TERHADAP KONSTRUKSI TEORI MODAL SOSIAL

Riandini Tri Astuti^{1*}, Yogi Pasca Pratama²

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Email Korespondensi: dinitriastuti@gmail.com

Abstraksi

Berada pada zaman di mana budaya tradisional terus tergerus oleh perkembangan budaya kontemporer, fenomena abdi-Dalem Kraton dirasa masih relevan untuk menggambarkan adanya pengaruh budaya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama bagi budaya dan masyarakat Jawa. Abdi-Dalem adalah jenis pekerjaan yang di dalamnya terkandung unsur modal sosial dengan latar belakang kebudayaan.³ Berbeda dengan jenis pekerjaan yang lain, motif utama abdi-Dalem adalah murni pengabdian. Berdasar pada pengkajian tekstual dan kontekstual, penulis menemui adanya pergeseran motif pengabdian, yaitu tujuan pengabdian kepada raja menjadi berbagai tujuan pengabdian bukan kepada raja. Hal tersebut berpengaruh terhadap pola sejarah pengabdian. Setidaknya sampai penelitian ini selesai dilakukan, sejarah pengabdian didominasi faktor keturunan, hanya beberapa yang bukan faktor keturunan. Objek penelitian difokuskan klan keluarga Mbah Dullah⁴, sebagai satu-satunya klan keluarga abdi-Dalem terbesar di Kraton Kasunanan Surakarta yang hingga saat ini telah memiliki lima keturunan abdi-Dalem. Keputusan menjadi dan bertahan mengabdikan, mendorong para abdi-Dalem untuk memiliki pekerjaan sambilan yang ternyata tidak jauh dari budaya dan lingkungan Kraton.

Kata kunci: abdi-Dalem, modal sosial, budaya Jawa

1. PENDAHULUAN

Telah banyak penelitian yang membawa kita pada pemahaman bahwa pekerjaan abdi-Dalem tidak berorientasi pada pendapatan atau upah. Sebagai tambahan untuk membuat argumen tersebut terang dan kuat, penulis akan memberi paparan tentang fenomena abdi-Dalem yang dihubungkan dengan konsepsi gender untuk dapat ditarik kesimpulan secara umum. Gender, sebagai pembeda identitas antara laki-laki dan perempuan, digunakan untuk menentukan posisi laki-laki dan perempuan yang meliputi; peran, kedudukan, hubungan, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam keluarga atau rumah tangga, gender diterapkan dengan melakukan pembagian kerja antara suami dan istri yang didasarkan pada konsep keunggulan komparatif antara sektor publik dan sektor domestik dengan tujuan untuk mencapai utilitas. Umumnya, praktik pembagian kerja tersebut menghasilkan kondisi dimana istri terspesialisasi untuk bekerja di sektor domestik dan suami di sektor publik. Model pembagian kerja yang merujuk pada konsep gender tradisional ini dilakukan secara penuh oleh masyarakat Jawa (Geertz, dalam (Hayati, 2006). Geertz menambahkan, konsep gender tradisional hanya dapat berlaku untuk kasus rumah tangga yang mampu, artinya untuk kasus rumah tangga tidak mampu, istri juga akan ikut masuk ke dalam sektor publik untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Pada satu sisi dalam masyarakat Jawa, terdapat sekelompok wanita yang memutuskan untuk menjadi pengabdian. Dihadapkan pada konsepsi gender, berarti sekelompok wanita tersebut telah keluar dari sektor domestik dan masuk ke dalam sektor publik karena bagaimana pun abdi-Dalem adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Namun benarkah sekelompok wanita pengabdian ini mendasari keputusannya pada upah yang ditujukan untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hasil temuan penelitian Geertz? Tentu saja tidak karena selain tidak ada orientasi pendapatan

dalam pengabdian, upah yang diterima abdi-Dalem jelas jauh dari upah minimum. Lantas apa yang dituju dalam pengabdian? Masyarakat Jawa, sebagai masyarakat yang dikenal *nguri-uri* (istilah bahasa Jawa yang berarti (usaha) melestarikan budaya, merupakan kumpulan masyarakat yang secara geografis bertempat-tinggal, bergaul, dan berkembang di Pulau Jawa, termasuk diantaranya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kebudayaan diartikan sebagai unsur pengorganisasian antar individu dan membentuknya menjadi satu kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia di dalam lingkungan hidupnya. Meski budaya Jawa sangat beragam, namun hakikatnya budaya Jawa terpusat pada budaya Kraton yang berkembang di Solo dan Yogyakarta (Roqib, 2007). Kraton, sebagai salah satu kerajaan tradisional yang masih ada sampai sekarang, merupakan lingkungan di mana nilai-nilai feodalistis lahir dan berkembang. Salah satu praktik feodalistis tersebut adalah adanya stratifikasi sosial masyarakat yang secara hierarki terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: raja dan keluarga raja atau *sentana-Dalem*, pegawai dan pejabat kerajaan atau *abdi-Dalem*, dan rakyat biasa atau *kawula-Dalem* (Ratna, 1999). Penentuan status sosial tersebut didasarkan pada dua kriteria, yaitu hubungan darah dan hierarki birokrasi. Raja, sebagai pihak yang berada pada tingkatan paling atas dalam kerajaan, merupakan satu-satunya penguasa mutlak yang berperan sebagai pelindung rakyat dan kerajaan. Untuk menjalankan peran tersebut, raja dibantu oleh pegawai kerajaan yang menempati stratifikasi sosial tepat di bawah raja dan keluarga raja, yaitu kelompok abdi dalem atau priyayi. Aktifitas ini yang seiring berkembangnya waktu mengkristal menjadi sebuah pengabdian yang juga tercermin dari pendapat (Alfian., 1985) mengenai hubungan satu kebudayaan dengan persepsi masyarakat terhadap kebudayaan itu sendiri, “Persepsi adalah bukan semata-mata berarti intuisi mengenai kenyataan atau sejenis pengetahuan tertentu. Persepsi masyarakat tentang kebudayaan, memberi tekanan pada kebudayaan sebagai aksi (kerja), karena menurutnya pemahaman tentang kebudayaan bertolak dari kerja manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup”. Pengabdian dilandasi oleh satu ideologi yang tertanam kuat dalam masyarakat. Pengabdian juga diperkokoh oleh keyakinan akan berlakunya takdir yang telah menentukan tempat layak dalam hierarki sosial (Moertono, 1985). Pada salah satu konsep pokok mistik budaya Jawa, dikenal istilah “*manunggaling kawula Gusti*” yang berarti bersatunya manusia dengan Tuhan. Secara historis, keyakinan dan pemahaman pada istilah tersebut telah mengakar pada kerajaan-kerajaan agraris di Jawa, termasuk di dalamnya Kraton Kasunanan Surakarta. Hubungan konsep agama dan politik yang erat akan lebih jelas tampak ketika melihat hubungan persatuan antara raja dengan rakyatnya yang juga merefleksikan hubungan kawula dengan Gusti. Sehingga, rakyat wajib taat dan patuh terhadap setiap kehendak raja. Abdi-Dalem berkeyakinan bahwa abdi adalah pekerjaan mulia sebagai wujud mensyukuri dan mengabdikan kepada Tuhan. Abdi-Dalem juga percaya bahwa abdi adalah jalan untuk mencapai berkah hidup ketentraman hati.

Artikel ini mencatat adanya tiga rumusan masalah. Pertama, rumusan masalah tentang kepada (si)apa pengabdian abdi-Dalem ditujukan. Uraian pada pendahuluan menyepakati perihal tidak adanya kecenderungan pemburuan upah pada pekerjaan abdi-Dalem. Seorang ibu rumah tangga yang memutuskan untuk mengabdikan –sesuai temuan penelitian Geertz–, tentu sedang tidak mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Banyak faktor yang melandasi keputusan tersebut. Sejarah mencatat bahwa mulanya pengabdian ditujukan mutlak kepada raja. Penghargaan tinggi diberikan masyarakat kepada raja. Namun seiring berkembangnya waktu, seiring pula pada perubahan peran raja dalam masyarakat, apakah membawa perubahan pula terhadap kecintaan masyarakat terhadap raja yang otomatis berpengaruh pada orientasi pengabdian? Di zaman kontemporer seperti ini, kepada (si)apa abdi-Dalem mengabdikan?

Selanjutnya, bagaimana konsekuensi dari adanya perubahan motif pengabdian dan pola yang dihasilkan? Misalnya, tentang bagaimana persepsi yang masyarakat – atau dalam hal ini

adalah abdi-Dalem— terhadap raja dan keluarga raja, lingkungan Kraton, dan budaya Jawa. Pola sejarah pengabdian yang dimaksudkan tidak hanya berbicara tentang sejarah ke atas (orang tua atau saudara tua), tetapi juga tentang bagaimana mereka melanjutkan pengabdian sampai pada keturunannya, yang secara otomatis berpengaruh pada keberlanjutan fenomena abdi-Dalem itu sendiri.

Terakhir, rumusan masalah ada pada bagaimana abdi-Dalem memainkan peran lain selain sebagai pengabdian. Penulis membatasi maksud peran di sini ada pada peran pekerjaan sambilan. Upah pengabdian yang tidak memadai—juga atas kerelaan para pengabdian—, membuat pengabdian harus bekerja yang lain untuk tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Adakah kemungkinan cara-cara yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaan mengabdikan, seperti yang didugakan Alfian bahwa “persepsi tentang kebudayaan memberi tekanan pada kebudayaan sebagai aksi (kerja) karena pemahaman tentang kebudayaan bertolak dari kerja manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup”?

2. KAJIAN PUSTAKA

Sekilas Tentang Ideologi Negara Tradisional, Budaya Jawa, dan Abdi-Dalem

Ongkokham (Alfian., 1985) mengatakan bahwa negara tradisional, yang lahir berdasarkan kekerasan⁷, memiliki struktur kekuasaan yang renggang dan alat kekuasaan yang lemah. Negara tradisional tidak pernah mengembangkan struktur birokrasi yang ketat karena hak khusus ada pada penakluk yang kuat secara fisik, yaitu elit negara. Kondisi tersebut berakibat pada distabilitas negara. Untuk mengatasinya, kelemahan struktur birokrasi ditutup melalui ideologi yang harus bersifat teokratis, yaitu dapat mencakup seluruh kepercayaan dan agama masyarakat. Juga berlaku sebaliknya, masyarakat harus mampu merefleksikan diri dalam negara tradisional.

Pada zaman Kerajaan Mataram, salah satu agama yang paling dominan dalam masyarakat adalah agama Islam dengan aliran sufisme yang menekankan pada aspek-aspek mistik dari agama. Islam sufi banyak berbicara mengenai persoalan sang pencipta, alam, dan manusia. Salah satu pengaruh agama Islam sufi ini datang dari Sunan Bonang yang merefleksikan sifat Tuhan/Allah pada diri manusia. Konsep mistik tersebut dikenal dengan ajaran insun atau formula mistik “Tuhan adalah Aku”. Dalam istilah Jawa, bersatunya manusia dengan Tuhan dikenal dengan *manunggaling kawula Gusti*, yang hingga kini masih menjadi konsep pokok mistik Jawa.

Secara historis, keyakinan dan pemahaman istilah tersebut telah mengakar pada kerajaan-kerajaan agraris di Jawa, termasuk di dalamnya Kraton Kasunanan Surakarta yang mengenal nilai-nilai feodalistis seperti stratifikasi sosial masyarakat yang secara hierarki terbagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing tingkatan kelompok memiliki wadah sosial, budaya, politik yang berbeda-beda, yaitu: i) raja dan keluarga raja atau *sentana-Dalem*, ii) pegawai dan pejabat kerajaan atau *abdi-Dalem*, dan iii) rakyat biasa *kawula-Dalem* (Ratna, 1999). Penentuan status sosial tersebut didasarkan pada dua kriteria, yaitu hubungan darah dan hierarki birokrasi. Raja, sebagai pihak yang berada pada tingkatan paling atas dalam kerajaan, merupakan satu-satunya penguasa mutlak yang berperan sebagai pelindung rakyat dan kerajaan. Untuk menjalankan peran tersebut, raja dibantu oleh pegawai kerajaan yang menempati stratifikasi sosial tepat di bawah raja dan keluarga raja, yaitu kelompok abdi dalem atau priyayi. Aktifitas ini yang seiring berkembangnya waktu mengkristal menjadi sebuah pengabdian yang juga tercermin dari pendapat (Alfian., 1985) mengenai hubungan satu kebudayaan dengan persepsi masyarakat terhadap kebudayaan itu sendiri, “Persepsi adalah bukan semata-mata berarti intuisi mengenai kenyataan atau sejenis pengetahuan tertentu. Persepsi masyarakat tentang kebudayaan, memberi tekanan pada kebudayaan sebagai aksi (kerja), karena menurutnya pemahaman tentang kebudayaan bertolak dari kerja manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup”. Kebudayaan diartikan sebagai unsur pengorganisasian antar

individu dan membentuknya menjadi satu kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia di dalam lingkungan hidupnya. Pengabdian dilandasi oleh satu ideologi yang tertanam kuat dalam masyarakat. Ideologi merupakan suatu logika yang berkesinambungan dan memiliki konsekuensi tertentu. Fenomena tenaga kerja pada negara tradisional dapat ditarik benang merah antara ideologi negara tradisional dengan realitas, baik realitas spiritual maupun realitas konkret.

Pokok persoalan negara tradisional adalah bahwa manusia merupakan satu-satunya sumber tenaga kerja negara tradisional. Moertono (1985) menggambarkan kehidupan suatu negara yang ditentukan oleh rakyat, yang secara ekonomi merupakan unsur penting untuk menghasilkan kekayaan dan mempertahankan kerajaan, terlebih di masa pra-mekanisasi. Sejarawan-sejarawan borjuis telah menemukan hal yang paling konkret, bahwa 'masyarakat adalah totalitas konkret' dan sistem produksi serta pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas dalam suatu masa sejarah. Relasi-relasi yang tercipta adalah relasi antara pekerja dengan kapitalis, bukan relasi antar individu-individu. Ideologi dan konsep negara tradisional yang terletak pada peradaban kraton sebenarnya berakar dari masyarakat agraria atau petani. Petani yang berada pada kalangan kelas bawah produktif bekerja dengan berpijak langsung pada bumi. Penggunaan simbol-simbol magis ditujukan untuk menanamkan ketaatan. Sehingga dalam masyarakat tradisional lalu timbul simbol-simbol magis seperti *siti bumi cahaya*, *lungguh*, dan simbol-simbol kekuasaan seperti *blencong*, *dalang*, *gunung*, dan lain-lain. Hubungan konsep agama dan politik yang erat di Negara Mataram akan lebih jelas tampak ketika melihat hubungan persatuan antara raja dengan rakyatnya yang merefleksikan hubungan kawula dengan gusti. Sehingga, rakyat wajib taat dan patuh terhadap setiap kehendak raja. Koentjaraningrat (dalam Roqib, 2007) mengatakan: "*Di kerajaan-kerajaan ini berkembang konsep khusus mengenai sifat derajat. Dasarnya adalah kesadaran orang akan hubungan yang dekat antara susunan semesta alam dengan kerajaan manusia. Dunia manusia yang diwakili oleh kerajaan, dengan raja sebagai penjelmaan salah satu dewa, mempunyai tugas kewajiban untuk menjaga keselarasan kosmos dengan jalan meniru susunan alam semesta dalam kerajaannya. Kedudukannya di pusat kerajaan melambangkan raja dewa di pusat alam semesta. Rakyat percaya bahwa stabilitas, keamanan, dan kemakmuran negara dapat dipertahankan dengan menjaga keseimbangan dari kekuatan sakti itu di pusat, dan bahwa tugas raja adalah untuk tetap mempertahankan keseimbangan itu. ...*". Moertono (1985) mengungkapkan, hubungan pejabat dengan raja sifatnya tanpa syarat dan sepenuhnya patuh, karena hanya raja yang dapat menganugerahkan *kamukten* (kedudukan, kesejahteraan, dan kemakmuran). Hubungan seperti ini memang terjadi di negara agraris apabila raja memiliki hak mutlak untuk mengatur penggunaan tanah dan gaji para pegawai kerajaan yang dibayar dengan hasil tanah dalam bentuk *lungguh*. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam *Wulangreh* tulisan Paku Buwana IX yang menyatakan, "*tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pengabdian kepada raja, ia akan dapat mengunjungi Kraton dan dihormati, mendapat nama baik (dalam masyarakat) dan juga akan mendapat lungguh. pengabdian dapat disamakan dengan sarap yang mengambang di samudra, ia akan pergi kemana saja ia diperintahkan*".

Dalam tradisi Jawa, kehidupan para abdi-Dalem atau priyayi dibagi menjadi tiga tahap, antara lain: 1) Tahap pertumbuhan atau magang yang ditandai oleh usaha-usaha mencoba mendapatkan pengalaman dan latihan *lara-lapa* (sakit dan lapar, penderitaan), 2) Tahap pertanggung-jawaban dan pelaksanaan kewajiban serta oleh usaha pencapaian kedudukan dan keagungan dalam dunia kebendaan, dan 3) Tahap pengunduran diri yang berarti merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup dan berusaha *ngelmu* (pengetahuan mistik). Kedudukan dan jabatan kerajaan Kraton diisi oleh para *punggawa* (pejabat) yang lebih sering dikenal dengan abdi-Dalem (abdi-Raja). Moertono (1985) menjelaskan bahwa para abdi-

Dalem, dari tingkatan terendah sampai yang tertinggi, perlahan akan menjadi satu lapisan sosial yang memiliki lapisan sosial di antara golongan raja dan kelompok kecil para pangeran

keturunan Raja (para *bendara*) dan golongan besar masyarakat biasa. Masyarakat biasa, dengan mengabaikan kekayaan dan sumber penghidupannya, disebut *tiyang alit* atau *wong cilik* (orang kecil). Sejarahinya, abdi-Dalem lahir atas pembagian elite penguasa negara yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bangsawan (raja dan *bendara*) dan bangsawan karena jabatan (*kawula*). Seperti yang tersebut dalam *Babad Tanah Jawi*, bahwa para pejabat kerajaan dapat memiliki kedudukan (aristokrat) yang sama karena menjadi abdi-Raja. Jadi, pada masa periode Mataram II, kelompok elite dapat dimasuki oleh rakyat biasa hanya dengan cara menjadi abdi-Dalem yang juga disebut '*kulawisuda (kawula dan wisuda)*' untuk diterjemahkan sebagai "diangkat ke sesuatu yang lebih tinggi".

Modal Sosial

Putnam (O'Neill, Brenda dan Gidengil, 2006) menjelaskan pengertian modal sosial yang merujuk pada hubungan antar individu, baik formal maupun informal. Modal sosial menekankan pada jaringan sosial dan norma kepercayaan dan hubungan timbal balik yang dinamakan 'kesepakatan politik warga negara'. Pada tahun 1970-an, modal sosial telah mengalami penurunan akibat perubahan sosial dan teknologi. Penurunan ini mengakibatkan pula penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan institusi tradisional serta semangat kerja sama dan toleransi yang justru menjadi intisari penyelesaian masalah kolektif masyarakat. Bourdieu (Yustika, 2006) mendefinisikan modal sosial sebagai agregat sumber daya aktual dan potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet (*durable*) sehingga meng-institusionalisasi-kan hubungan persahabatan (*acquaintance*) yang saling menguntungkan. Bourdieu (O'Neill, Brenda dan Gidengil, 2006) juga menekankan peran sejarah dan kekuatan yang terus terbentuk dan terakumulasi dalam banyak bentuk/jalan dalam proses pembentukan modal sosial.

"*It's not what you know, it's who you know the matters*", kalimat tersebut adalah aphorisme terkenal dari teori modal sosial yang bermakna bahwa modal sosial bukanlah tentang apa yang anda ketahui, namun siapa yang anda kenal. Modal sosial telah menciptakan ikatan di antara dan di sekeliling orang-orang melalui jaringan sosial yang merekonstruksi kesamaan kekuatan. Modal sosial merujuk pada sebuah norma yang mendorong untuk bertindak secara kolektif. Tindakan kolektif yang membentuk jaringan sosial tersebut bukan merupakan proses alam, namun merupakan sebuah konstruksi yang dibentuk melalui strategi investasi yang berorientasi pada pelebagaan hubungan kelompok yang digunakan sebagai sumber keuntungan.

Fungsi modal sosial bukan merupakan entitas tunggal melainkan entitas majemuk yang mencakup beberapa aspek dari struktur sosial dan memberikan fasilitas kepada pelaku terhadap tindakan tertentu dalam struktur sosial tersebut. Sehingga, sama dengan jenis modal lainnya, modal sosial juga bersifat produktif dan eksis untuk mencapai tujuan tertentu. Bourdieu menyimpulkan pengertian modal sosial dengan pernyataan: "*social capital as much as economic capitalism is an ideology of inclusion and exclusion: a means by which the powerful may protect and further their interests against the less powerful*". (Yustika, 2006) sendiri berpendapat bahwa modal sosial berbeda dengan dua modal lain yang lebih dulu populer dalam bidang ilmu sosial, yaitu modal ekonomi dan modal manusia, karena modal sosial berinteraksi langsung dengan struktur sosial. Struktur sosial di sini diterjemahkan sebagai: (i) seperangkat unit-unit sosial yang mempunyai perbedaan tipe sumber daya yang bernilai, (ii) secara hirarki berhubungan relatif dengan pemilik otoritas terhadap akses dan kontrol akan sumber daya, (iii) bagian tertentu dalam aturan dan prosedur pemanfaatan sumber daya, (iv) dipercaya kepada pelaku (*agents*) untuk bertindak sesuai aturan dan prosedur tersebut. Coleman (Yustika, 2006) menyatakan setidaknya ada tiga bentuk utama modal sosial, yaitu: i) struktur kewajiban, ekspektasi, dan kepercayaan; ii) jaringan informasi; dan iii) norma dan sanksi yang efektif.

Bentuk modal sosial bergantung pada kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Individu yang hidup di kalangan dengan tingkat

kepercayaan yang tinggi akan memiliki kualitas modal sosial yang baik, begitu juga sebaliknya. Pentingnya informasi mengakibatkan individu yang memiliki jaringan informasi lebih mudah (dan murah) dinilai memiliki kualitas modal sosial yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Terakhir, bentuk modal sosial yang penting dan nyata adalah adanya norma dan sanksi yang efektif sehingga mendorong individu untuk meraih prestasi.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu strategi penelitian kualitatif yang berisi deskripsi makna umum dari persepsi yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap berbagai pengalaman hidup yang mereka alami terkait dengan konsep atau fenomena tertentu, serta termasuk cara peneliti memberi makna terhadap pengalaman tersebut. Hasil penelitian fenomenologi bersifat kasuistik atau tidak berorientasi pada generalisasi. Peneliti melandasi analisis data pada teori atau konsep modal sosial, dan sedikit gender sebagai penghantar. Bab pembahasan membahas –sekaligus menjawab rumusan masalah– tentang orientasi pengabdian, sejarah pengabdian, dan peran-peran yang dimainkan oleh para abdi-Dalem. Kajian budaya sangat terasa kental dalam artikel ini karena kedekatan unsur budaya – khususnya budaya Jawa– dengan fenomena abdi-Dalem.

Informan kunci penelitian ini adalah seorang petinggi abdi-Dalem yang bernama Kanjeng Win, yang darinya, peneliti diarahkan kepada klan keluarga Mbah Dullah sebagai fokus penelitian untuk mencapai tujuan penelitian karena keunikan yang dimiliki. Klan keluarga Mbah Dullah adalah satu-satunya klan keluarga abdi-Dalem terbesar (telah sampai pada generasi ke-5) yang bertahan hingga saat ini. Informan yang berasal dari klan keluarga Mbah Dullah berjumlah 4 orang. Selanjutnya, salah satu narasumber proaktif dari klan keluarga Mbah Dullah mengarahkan untuk mencari informan pendukung yang otomatis berfungsi sebagai pendukung data penelitian dan berjumlah 4 orang. Titik henti proses wawancara dengan informan pendukung ada pada masa kejenuhan oleh peneliti ketika respon yang diberikan informan memiliki arah yang sama. Sehingga secara keseluruhan, total informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 9 informan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data Observasi Partisipasi Pasif yang dilakukan dengan mengamati pada saat berlangsungnya kegiatan *blanja*n (penerimaan upah) pada hari Rabu, 05 Agustus 2015, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan diakhiri dengan uji validitas data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan mempersiapkan dan mengorganisasikan data penelitian, kemudian mereduksinya menjadi tema melalui proses pengodean (*coding*), baru setelah itu data penelitian disajikan dalam pembahasan. Analisis data tidak bersifat *off-the-shelf* (mengikuti apa yang sudah ada), tetapi analisis ini dikembangkan, direvisi, dan ‘dikoreografi’ (Huberman & Miles, 1994 dalam Creswell, 2013), sehingga sebagian besar hasil penelitian kualitatif bersifat intuitif, lunak, dan relatifistik.

Penelitian fenomenologi mengembangkan metode analisis data yang terstruktur dan spesifik. Creswell (2013) menjelaskan beberapa poin penting dalam teknis analisis data fenomenologi, antara lain: (i) mendeskripsikan pengalaman personal individu dengan fenomena yang sedang diteliti, (ii) menemukan dan menyusun pernyataan penting partisipan serta menganggapnya memiliki nilai yang setara (horisontalisasi), (iii) mengelompokkan pernyataan-pernyataan penting yang telah disusun menjadi unit makna atau tema, (iv) membuat deskripsi tekstural (tentang pengalaman apa yang dialami oleh partisipan terkait dengan fenomena yang sedang diangkat) dan deskripsi struktural (bagaimana bagaimana pengalaman tersebut terjadi), (v) menulis deskripsi gabungan (gabungan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural) hingga menemukan esensi dari pengalaman tersebut yang diwujudkan dalam paragraf panjang dan merupakan puncak studi fenomenologi.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Motif Pengabdian

Berdasar pada kajian tekstual dan kontekstual, penulis menangkap adanya pergeseran motif pengabdian fenomena abdi-Dalem Kraton. Pada kajian tekstual, dapat dipahami bahwa motif pengabdian pada masa lalu hanya ditujukan mutlak untuk raja. Pemahaman tersebut dilandasi oleh konsep pokok mistik Jawa “*manunggaling kawula Gusti*” di mana raja dianggap sebagai refleksi wujud dan sifat ketuhanan. Sebagai mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam aliran sufisme, pemahaman tersebut diyakini secara penuh. Kondisi masyarakat yang terbagi ke dalam kelas-kelas sosial, mengkondisikan raja menjadi penguasa tunggal kerajaan yang bertugas untuk melindungi rakyat dan kerajaan. Maka secara otomatis raja berada pada kedudukan yang lebih tinggi untuk kalangan keluarga raja di atas para abdi-Dalem (pegawai kerajaan) dan kawula-Dalem (masyarakat luar kerajaan). Pada akhirnya, rakyat harus tunduk pada setiap kehendak raja. Sikap tunduk yang dilakukan oleh abdi-Dalem ini seiring berkembangnya waktu mengkristal menjadi praktik pengabdian untuk membantu raja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada proses pengabdian tersebut, pada diri abdi-Dalem akan tercipta seperangkat nilai dan keyakinan tersendiri untuk mengabdikan.

Pergeseran motif pengabdian ditemukan pada kajian kontekstual yang menerangkan motif pengabdian mutlak hanya untuk raja tidak lagi ada. Kraton masa lalu tidak sama dengan Kraton masa sekarang. Sejarah menjelaskan bahwa pada masa lalu Kraton merupakan sebuah negara tradisional yang mandiri, utuh, dan kokoh. Namun semenjak lahir NKRI, negara tradisional Kraton ada pada penguasaan NKRI. Perubahan kondisi ini membawa dampak masif dan mendasar pada Kraton, yang salah satunya ada pada konsep dasar pengabdian, namun tidak berpengaruh pada loyalitas abdi-Dalem. Mereka tetap mengabdikan. Mengabdikan kepada (si)apa?

Artikel ini meringkas beberapa motif pengabdian yang terasa baru. “*Saya bukan abdi-Dalem PB XIII, saya abdi-Dalem Kraton. Saya bukan abdi-Dalemnya Gusti, saya abdi dalemnya Kraton. ... Raja dan gusti-gusti setiap saat bisa hilang, tetapi kalau kraton, hilangnya bersama jagad. ... Karena kalau mengabdikan kepada raja atau gusti berarti pembantu atau batur (pembantu)*” (Kanjeng Win, 2015). Kutipan tersebut memberi pemahaman kepada kita bahwa motif pengabdian yang dilakukan abdi-Dalem ditujukan kepada Kraton sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Kraton sebagai pusat kebudayaan Jawa juga menyiratkan makna bahwa dalam hal pengabdian, abdi-Dalem bertindak sebagai partisan pelestari budaya lokal. Selain itu, pengabdian yang dilakukan juga ditujukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup berupa keberkahan dan ketentraman hidup yang dirasa hanya bisa didapatkan melalui pengabdian terhadap Kraton. “*Lha pripun atine mpun seneng og, Mbak. Atine seneng ngoten mpun, mboten nggagas blonjo*” [*Lha* bagaimana, hatinya sudah senang kok, Mbak. (Kalau hatinya senang ya sudah, tidak peduli gaji] (Bu Prayem, 2015). Kondisi tersebut tepat sesuai dengan pendapat Moertono (1985) bahwa masyarakat Jawa tidak akan menganggap negara telah memenuhi kewajiban-kewajiban bila negara tersebut tidak mendorong suatu ketentraman batiniah (*tentrem*, kedamaian, dan ketenangan hati) maupun mewujudkan tata-tertib formal seperti peraturan negara. Dengan demikian akan tercapai tujuan negara mewujudkan keselarasan dan keharmonisan untuk menata kehidupan dunia, yang merupakan titik pusat seluruh kegiatan manusia ini diarahkan.

Sejarah Awal Mula Pengabdian

Secara garis besar, pola sejarah awal mula pengabdian terbagi menjadi dua besar, yaitu turunan dan *bukan* turunan. Turunan berarti diturunkan dari orang tua atau saudara tua, sedangkan *bukan* turunan berarti *tidak* diturunkan dari orang tua atau saudara tua, biasanya terjadi karena hubungan kedekatan dengan raja, keluarga raja, maupun lingkungan Kraton. Setidaknya sampai penelitian ini selesai dilakukan, sejarah pengabdian didominasi oleh faktor keturunan. Faktor *bukan* keturunan banyak terjadi pada masa lalu ketika hubungan antara masyarakat dengan raja masih terjalin intim dan peran serta pengaruh Kraton masih terasa kuat

bagi kehidupan masyarakat. Beberapa abdi-Dalem pada masa tersebut mencetak sejarah pengabdian dengan latar belakang memiliki hubungan kedekatan dengan raja atau lingkungan Kraton dan membuktikan loyalitasnya hingga sekarang. Seperti pada kasus Bu Masinir yang mengawali pekerjaan mengabdikan dengan sebelumnya menjadi asisten rumah tangga Sinuhun PB XII. Setelah sekian lama, Bu Masinir mendapat dan menerima tawaran untuk bergabung menjadi abdi-Dalem. Kasus lain ada pada Bu Prayem yang mengawali pengabdian dari kemampuan yang dimiliki untuk menari bedhaya. Dan lain-lain. *“It’s not what you know, it’s who you know the matters”*, modal sosial bukan tentang apa yang anda ketahui namun siapa yang anda kenal, begitu bunyi aphorisme terkenal modal sosial. Modal sosial merujuk pada hubungan antar individu baik formal maupun informal dan menekankan pada jaringan sosial dan norma kepercayaan dan hubungan timbal balik yang dinamakan dengan ‘kesepakatan politik warga negara.’ (O’Neill, Brenda dan Gidengil, 2006)

Satu lagi pola sejarah pengabdian yang lain yaitu pola pengabdian keturunan. Untuk memaparkan pola ini, penulis mengangkat keunikan yang ada dalam cerita sejarah perabdi-Daleman Kraton Kasunanan Surakarta yaitu klan Mbah Dullah. Klan ini merupakan satu-satunya klan keluarga abdi-Dalem terbesar yang mencapai lima generasi dan masih bertahan hingga sekarang. Bourdieu (O’Neill, Brenda dan Gidengil, 2006) menekankan peran sejarah dan kekuatan yang terus terbentuk dan terakumulasi dalam banyak bentuk atau jalan dalam proses pembentukan modal sosial. Mbah Dullah sendiri adalah abdi-Dalem tertua, perempuan, dan merupakan turunan ke tiga dari lima generasi yang sampai saat ini telah sampai pada cucunya. *“Kulo niku nggih, mbah kulo eyang kulo, budhe kulo niku abdi-Dalem njero Kraton. ... Dadi kulo niku bayi, enten njero weteng men, kulo pun teng njero Kraton. ... Kat bayi kok kulo enten teng njero kraton, pokoke kulo lahir mpun teng enten njero (Kraton), mboten ngerti kulo, rumongso kulo omah kulo nggih njero (Kraton)”* [Saya itu ya, nenek saya eyang saya, budhe saya itu abdi-Dalem di dalam Kraton. Jadi saya itu bayi, masih di dalam perut pun, saya sudah di dalam Kraton. Sejak bayi kok saya sudah ada di dalam Kraton, pokoknya saya lahir sudah ada di dalam (Kraton), tidak tahu saya, saya kira rumah saya ya di dalam (Kraton)] (Mbah Dullah, 2015).

Selain peran sejarah, pola asuh anak yang sangat dekat dengan kehidupan Kraton secara langsung maupun tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap proses penciptaan sumber daya modal sosial yang baru untuk mengabdikan. Pekerjaan mengabdikan, juga pekerjaan modal sosial lainnya, yang telah memiliki ikatan atau jaringan sangat kuat akan menciptakan kecenderungan untuk terus-menerus ada. Pengharapan tersebut yang pada akhirnya berpengaruh terhadap cara dan atau gaya pemeliharaan anak-anak mereka. Meski pada kenyataan yang berseberangan, kecenderungan untuk berhenti dari faktor turunan abdi-Dalem tidak dapat dielakkan karena beberapa faktor yang melatar-belakanginya. Sampai sejauh ini, faktor pendapatan yang menjadi dasar alasan utama munculnya kecenderungan pemberhentian turunan abdi-Dalem ini. *“Lha niku mangke anak kulo pun mboten. Masalahe cocok gawean kulo mboten, nek teng kraton, nuwun sewu, niku nyuwun berkah, nek blonjo, mung paribasan numpang pareng, wonten sing seket, wonten pitung doso, wonten setunggal atus, mboten kathah”* [Lha itu nanti anak saya sudah tidak. Masalahnya cocok dengan pekerjaan saya atau tidak. Kalau di Kraton, mohon maaf, itu meminta berkah, kalau upah ibaratnya hanya *numpang pareng*, ada yang lima puluh, ada yang tujuh puluh, ada yang seratus, tidak banyak] (Sartinah, 2015).

Pekerjaan Abdi-Dalem dan Pekerjaan Lainnya

Dari banyak narasi yang telah disampaikan sebelumnya, kesepakatan utama sub-bab pembahasan ini ada pada pemahaman bahwa pekerjaan abdi-Dalem tidak berorientasi pada pendapatan. Ciri khas masyarakat pra-kapitalis jika dibandingkan dengan masyarakat kapitalis adalah sifat cukup-diri (*self-sufficient*). *“Nek sesasi ya cuma sekitar Rp 139.000,-, ya pernah nggak gajian selama satu tahun, pokoke kalau di sini itu ya nggak mikir gaji”* (Menuk, 2015).

Nominal pendapatan yang diterima abdi-Dalem setiap bulan tersebut memang jauh di bawah upah minimal (UMR) karena memang pada dasarnya Kraton tidak mengenal sistem pengupahan, Kraton hanya menggunakan sistem *'tulah'*. *"Mengabdi di kraton itu tidak mudah, itu termasuk panggilan. Kalau lamaran baru jelas ndak mungkin, karena gini, kalau lamaran baru, bukan panggilan, dan mereka tujuannya ingin cari nafkah, ndak mungkin bisa. Karena ngelamar di Kraton, mesti nanya gajinya berapa gitu, padahal di kraton ndak ada sistem gaji. Pengabdian, ada tulah namanya. Tulah itu, tulah itu kepucak atau hanya sekedar kesejahteraan yang orang luar menamakan itu blonjo atau gaji, itu monggo terserah"* (Kanjeng Win, 2015). Tulah yang diterima abdi-Dalem besarnya beragam berada pada rentang Rp 105.000,- hingga Rp 200.000,- per bulan. Selain *tulah* bulanan, para abdi-Dalem juga mendapat tambahan pendapatan untuk waktu dan pekerjaan tertentu, misalnya membantu persiapan apabila Kraton sedang mengadakan acara adat atau yang lain.

Sistem kerja yang dijalankan abdi-Dalem berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sistem kerja yang ada antara lain setiap hari, hari tertentu, dan *topo seren* (empat hari kerja disusul empat hari libur). Penekanan ada pada kelonggaran peraturan pekerjaan abdi-Dalem. Sangat longgar. Kraton memberikan kebebasan bagi para abdi-Dalem untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan abdi-Dalem selama tugas yang diwajibkan telah selesai dikerjakan. *"Statusnya ngabdi di Kraton gitu, tapi masalah keluarga sok masih ke sana ke sini itu, masih tetep. ... Jadi pemerintahan (ngasih) kebebasan itu tetep sami gitu lho. Dari awal dulu, peraturannya bagi abdi-Dalem di sini itu, pokoknya masuk kerja sampai sekarang itu masih sae. Jadi masih bebas ngoten. Nek terikat banget, tertekan banget, ngoten mboten (begitu tidak). Sangat bebas. Dados menika dengan sukarela sukahati pokoke (pokoknya) ngabdi di Kraton niku nggih..."* (Thakthuk, 2015). Sikap sadar akan tanggung jawab terhadap masing-masing pekerjaan oleh para abdi-Dalem menjadi kunci utama keberhasilan sistem kerja ini. Kraton telah berhasil untuk itu.

Peraturan yang dipakai untuk mengatur segala urusan di dalam Kraton adalah aturan adat. Meski Kraton memberikan kelonggaran, namun tidak berarti pekerjaan abdi-Dalem dapat dipasang-lepas dengan mudah. Apabila abdi-Dalem memutuskan untuk keluar, maka selamanya akan keluar, tidak bisa masuk lagi.

"Lha angel kulo, nyopot yo ra keno. Nek nyopot, pun nggih pun, padane dijuluk anak putu, nyopot nggih pun metu, bar wis ra ngenjer, melu wong njobo mriko" [Lha sulit saya, melepas ya taidak bisa. Kalau melepas, sudah ya sudah, ibarat diminta anak cucu, melepas ya sudah keluar, ikut orang luar] (Mbah Dullah, 2015). Namun apabila seseorang telah menjadi abdi-Dalem dan menunjukkan loyalitasnya dengan mengabdi sepanjang hidupnya, maka pihak Kraton akan berupaya penuh untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi para abdi-Dalem tersebut. Abdi-Dalem hanya akan terlepas apabila dilepas secara sengaja atau sampai pada waktu meninggal dunia, sehingga tidak mengenal istilah *'pensiun'*.

Giddens (1985) mengatakan pekerja tradisional tidak berpikir untuk berusaha meningkatkan upah harian setinggi mungkin. Mereka lebih memikirkan untuk berapa banyak pekerjaan yang harus ia lakukan agar bisa memperoleh penghasilan yang bisa menutupi kebutuhan biasanya. Orang akan tidak secara alamiah menghendaki berpenghasilan banyak, akan tetapi dia ingin hidup sebagaimana biasanya dia hidup, serta bagaimana dia sudah terbiasa untuk hidup dan mendapat penghasilan secukupnya sesuai dengan kebutuhan hidup biasanya. Pendapat Giddens dengan sangat baik mendasari fenomena abdi-Dalem telah secara alamiah melakukan pekerjaan di luar pekerjaan sebagai abdi-Dalem. Pekerjaan sambilan ini mayoritas tidak jauh dengan lingkungan dan budaya Kraton. *"Lha menika suwito thok, suwito thok yo dos pundi, nek ora nggo nyambi-nyambi dodol. Dodol janggan, dodol lawuh..."* [Lha itu (kalau) mengabdi saja ya bagaimana kalau tidak untuk menyambi berjualan. Berjualan lauk-pauk...] (Mbah Dullah, 2015). Mbah Dullah menganggap bahwa berkah mengabdi yang didapatkan salah satunya adalah kemampuan meramu jamu untuk dipasarkan sebagai tambahan

penghasilan. Kemampuan meramu jamu tersebut diturunkan kepada Mbak Ning, cucunya. Kanjeng Win, selain aktif dalam urusan intern Kraton, juga aktif berkegiatan di bidang kebudayaan, sehingga banyak yang memberikan label budayawan. Sejalan dengan Mbah Dullah, Kanjeng Win beranggapan bahwa hal tersebut merupakan berkah yang diberikan Tuhan sebagai balasan atas pengabdian yang dilakukan untuk Kraton. Bu Sartinah ahli *memiru* jarik, Bu Masinir dulu menjahit pakaian *dodot* wanita, Bu Hadi membuka *catering* khusus untuk orang dan acara Kraton, Pak Hemung yang berdagang dengan menjadikan lingkungan Kraton sebagai segmentasi pasar, dan lain-lain. Sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak jarang memberikan pendapatan yang lebih besar dari *tulah*. Namun hal tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap loyalitas abdi-Dalem karena bagi mereka pekerjaan utama tetap mengabdikan.

Perhatian khusus diberikan kepada para abdi-Dalem wanita, terlebih bagi yang telah berkeluarga. Konsep gender tradisional, yang telah mengakar sampai pada tingkat mikro rumah tangga, memosisikan wanita atau istri untuk bertanggung-jawab pada sektor domestik dan pria atau suami pada sektor publik. Geertz (Hayati, 2006) berpendapat bahwa hampir seluruh masyarakat Jawa menerapkan konsep gender tradisional tersebut. Geertz juga menambahkan, konsep gender tradisional hanya berlaku pada kasus rumah tangga yang dianggap mampu, yang berarti untuk kasus rumah tangga yang tidak mampu, wanita atau istri juga ikut masuk ke dalam sektor publik. Mengamati kehadiran abdi-Dalem wanita ke lingkungan Kraton, dapat disimpulkan kehadiran mereka pula ke dalam sektor publik. Bagaimana pun, abdi-Dalem adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Akan tetapi akan sangat salah apabila menyebut kehadiran mereka untuk orientasi tambahan penghasilan seperti analisis yang disampaikan Geertz. Kasus abdi-Dalem wanita menjadi perkecualian atas konsep gender tradisional tersebut.

Pengamatan yang lebih jauh terhadap fenomena abdi-Dalem wanita memberikan pemahaman bahwa lingkungan Kraton tidak secara mutlak dianggap sebagai sektor publik (sektor di luar domestik). Tidak demikian. Kelonggaran yang diberikan menjadi salah satu faktor penguat analisis ini. Salah satunya adalah perihal pola asuh yang dapat dilakukan di lingkungan Kraton, seperti yang selama ini dijalani Mbak Ning. Setiap siang hari, Mbak Ning harus menjemput sekolah anak bungsunya, yang terkadang tidak langsung diajak pulang namun singgah terlebih dahulu di Kraton. “*Kebetulan saya waktu itu kan punya anak kecil, yang nomer dua itu, trus saya iyain aja* (tawaran dari GKR Alit untuk mengabdikan). *Karena kan saya kalau kerja di pabrik nggak bisa nyambi anak, kalau kerja di sini kan bisa nyambi momong anak, bisa bawa anak*” (Mbak Ning, 2015). Tentu hal tersebut berbeda jauh dengan jenis-jenis pekerjaan yang lain. “*Wong Keputren koyo dene omahe dewe, kok. ... Poro dene kulo menika dikek’i omah og. Dikek’i nggon ngoten lhe*”. [Orang Keputren sudah seperti rumah sendiri, *kok*. Ibaratnya saya itu diberi rumah, *kok*. Diberi tempat begitu, *lho*] (Mbah Dullah, 2015). Artinya, terjadi bias bagaimana konsepsi sektor domestik bagi abdi-Dalem wanita karena bagi mereka lingkungan Kraton juga dirasa sebagai rumah hunian.

(Wibowo, 2011) menjelaskan asal muasal ‘peran ganda’ yang disematkan pada wanita berasal dari perbedaan secara dikotomis antara sektor domestik dan sektor publik. ‘Peran ganda’ yang awalnya bertujuan untuk mencapai pemberdayaan wanita, justru seringkali menimbulkan dilematis yang kompleks dan berkepanjangan tentang peran yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Proses pemisahan konsep secara diametral ini bukan tidak mungkin akan menciptakan kepribadian yang terpecah (*split personality*) bagi kaum wanita yang justru membahayakan. Wanita seharusnya akan lebih baik jika dibiarkan menjadi dirinya sendiri, tanpa harus dikotak-kotakkan dalam pembagian sektor domestik-sektor publik.

5. KESIMPULAN

Berada pada zaman di mana budaya tradisional terus menerus tergerus oleh perkembangan global, namun fenomena abdi-Dalem masih relevan untuk menggambarkan bahwa budaya tradisional pernah dan masih berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi-sosial masyarakat, utamanya budaya dan masyarakat Jawa.

Tantangan paling nyata dalam regenerasi abdi-Dalem adalah tentang konsep kesejahteraan yang beradaptasi dengan masa sekarang yang bisa dipersempit makna menjadi permasalahan pengupahan. Oleh karena itu, saran penulis tujukan kepada pemangku adat Kraton Kasunanan dan Pemerintah Kota Surakarta, yang dalam hal ini berlaku sebagai pemegang kewenangan dan pembuat kebijakan, untuk bersepakat menghasilkan kebijakan yang ditujukan kepada kesejahteraan para abdi-Dalem. Permasalahan regenerasi menjadi sangat penting karena hal ini yang menjadi tonggak penerus *pe-nguri-nguri* budaya Jawa dan Kraton sebagai asset kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA\

- Alfian. (1985). *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta.
- Hayati, C. (2006). *Gender dan Perubahan Ekonomi : Peranan WANITA Dalam Industri Batik di Yogyakarta 1900-1965*". Retrieved from http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/chusnul_hayati.pdf, diakses pada 29 Juli 2015
- O'Neill, Brenda dan Gidengil, E. (2006). *Gender and Social Capital*. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A_JWhxqae1YC&oi=fnd%0A%0A&pg=PR1&dq=gender%3B+social+capital%3B+culture&ots=UOuB_HzU%0AB4&sig=cEH2YIC7N_GGJom8bKaGBgOyMiE&redir_esc=y#v=onepage%0A&q=gender%3B+social+capital%3B+culture&f=false,%0A
- Wibowo, D. E. (2011). *Peran Ganda Wanita dan Kesetaraan Gender*. 3, 356–364.
- Yustika, A. E. (2006). *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia.